



SENSITIVITAS ETIKA WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) BERDASARKAN PEKERJAAN, PENDIDIKAN, DAN GENDER

Alfiyan¹, Yani Susetyo²

^{1,2} Prodi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama, Semarang
e-mail : nextviolator@gmail.com¹

Penulis Korespondensi: Alfiyan
e-mail : nextviolator@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 20 Desember 2024
Revisi 23 Desember 2024
Diterima 26 Desember 2024

Kata kunci :

Sensitivitas Etika, Pendidikan,
Gender

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis diferensiasi sensitivitas etika wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan gender. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta merupakan hak warga negara untuk berkontribusi dalam pendanaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada 100 responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji korelasi dengan bantuan software SPSS. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan sensitivitas etika wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) berdasarkan pendidikan, sementara tidak ditemukan perbedaan sensitivitas berdasarkan pekerjaan dan gender. Dengan demikian, sensitivitas etika wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tetapi tidak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan maupun gender.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Received 20 December 2024
Revision 23 December 2024
Accepted 26 December 2024

Keywords :

Ethical Sensitivity, Education,
Gender

A B S T R A C K

This study aims to understand and analyze the differences in taxpayers' ethical sensitivity toward *tax evasion* based on occupation, education, and gender. Tax obligations are mandatory and coercive under legal regulations, serving as a means for citizens to contribute to national funding and government operations. This research employed a survey method by distributing questionnaires directly to 100 respondents. The collected data were analyzed using correlation tests with the aid of SPSS software. The results indicate that differences in taxpayers' ethical sensitivity toward *tax evasion* exist based on education, while no significant differences were found based on occupation and gender. Therefore, taxpayers' ethical sensitivity toward *tax evasion* is influenced by education levels but not by occupation or gender.

© 2024 Strategic: Journal of Management Sciences. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar atau bahkan menghindari pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum. Dalam dunia perpajakan, terdapat perilaku negatif dari wajib pajak yang

bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada.

Sistem perpajakan di Indonesia dibangun di atas prinsip kegotongroyongan. Sejak tahun 1984, Indonesia telah menganut *self-assessment system*, yang memberikan tanggung jawab kepada warga negara untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, otoritas pajak memiliki tugas memberikan arahan, melakukan penelitian, pengawasan, dan penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif hingga denda berat jika terjadi pelanggaran (Diamastuti, 2016).

Sensitivitas etika wajib pajak terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan seseorang dapat memengaruhi perilakunya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama jika penghasilannya berada di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Aulia, 2023). Dengan tingkat penghasilan tertentu, seseorang mungkin lebih terdorong untuk mencari celah dalam peraturan guna menghindari pajak. Faktor kedua adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan dan persepsi etisnya terhadap penggelapan pajak (Puspitaningrum, 2018). Wajib pajak dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya (Yadinta et al., 2018). Faktor ketiga adalah gender. Perbedaan gender dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap penggelapan pajak (Ramadhan & Helmy, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya potensi perbedaan sensitivitas etika antara wajib pajak laki-laki dan perempuan dalam menghadapi persoalan moral, termasuk penggelapan pajak (Nurhidayati & Suhartini, 2022).

Pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap sensitivitas etika wajib pajak tercermin dalam kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara (Yasa et al., 2019). Pada susunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2014, rencana total penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp1.667,1 triliun, di mana sebesar Rp1.110,2 triliun berasal dari sektor pajak. Persentase sebesar 66,59% tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara (Syafrianto, 2014). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara sederhana sensitivitas terhadap *tax evasion* berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan gender. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa oknum wajib pajak di Kota Pekalongan untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi sensitivitas etika wajib pajak terhadap praktik *tax evasion*.

2. STUDI LITERATUR

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat membawa dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keuangan, ekonomi, dan psikologi. Dampak penggelapan pajak (*tax evasion*) membawa akibat pada perekonomian secara makro (Siahaan, 2010).

2.1. Dampak Penggelapan Pajak

2.1.1. Dampak Penggelapan Pajak dalam Keuangan

Penggelapan pajak merugikan negara dengan menyebabkan ketidakteraturan dalam keuangan dan konsekuensi seperti kenaikan pajak dan gangguan ekspansi ekonomi (Nurhidayati & Suhartini, 2022). Wajib pajak yang menghindari pajak justru merugikan warga negara lain yang harus menanggung kekurangan akibat kelalaian tersebut (Siahaan, 2010).

2.1.2. Dampak Penggelapan Pajak dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak mengganggu perekonomian dengan beberapa dampak. Pertama, mengurangi persaingan usaha karena perusahaan yang menghindari pajak dapat menekan biaya secara ilegal (Jamalallail & Indarti, 2022). Kedua, menyebabkan stagnasi ekonomi karena perusahaan lebih fokus pada penghindaran pajak daripada memperluas usaha (Andiani, 2022). Ketiga, menghambat perputaran modal karena wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan berusaha agar tidak terdeteksi fiskus (Siahaan, 2010). Sebagai akibatnya, fleksibilitas modal perusahaan menjadi berkurang.

2.1.3. Dampak Penggelapan Pajak dalam Bidang Psikologi

Penggelapan pajak memengaruhi kebiasaan wajib pajak dalam mengabaikan hukum (Mentari, 2024). Wajib pajak yang terbiasa melanggar hukum akan kehilangan kontrol dalam situasi lain, yang bisa mengarah pada praktik-praktik curang lainnya, seperti penggandaan angsuran pajak dan denda (Siahaan, 2010).

2.2. Landasan Teori Penelitian

2.2.1. Sensitivitas Etika Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sensitivitas adalah kepekaan atau kemampuan cepat menerima rangsangan. Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika adalah kajian mengenai kecenderungan individu berdasarkan pengaturan tertentu sesuai ruang dan waktu, yang mencerminkan perilaku manusia dalam kehidupan secara keseluruhan (Sumaryono, 1995). Selain itu, etika juga sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan sikap dan pola perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok (Keraf & Imam, 1998). Etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku (Bertens, 2004).

2.2.2. Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

Penggelapan pajak adalah tindakan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menghindari kewajiban pajak dengan cara melanggar hukum. Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011). Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya (Mentari, 2024). Penggelapan pajak merupakan kegiatan tipu muslihat yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak sesuai peraturan. Adapun, penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan terkait kegiatan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan (Jamalallail & Indarti, 2022).

2.2.3. Pekerjaan

Pekerjaan merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus (Hasibuan, 2017). Setiap orang dapat memiliki pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan didasarkan pada panggilan atau keahlian tertentu. Pekerjaan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan seringkali memiliki status rendah dalam masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini cenderung kecil (Sipuan et al., 2023). Contoh pekerjaan yang dimaksud adalah operator, penjaga warnet, tukang ketik, teknisi komputer, dan sebagainya. Pekerjaan ini melibatkan hubungan antara suatu perusahaan atau badan usaha dengan pekerja atau karyawan.

2.2.4. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kecenderungan tertentu yang diberikan kepada individu dari usia satu ke usia berikutnya (Parwati et al., 2023). Pendidikan dapat diperoleh melalui pengajaran formal, kesiapan untuk ujian, atau pengalaman lainnya. Pendidikan sangat terkait dengan pengetahuan, di mana tingkat pendidikan seseorang sering mempengaruhi seberapa luas informasi yang dimilikinya (Baiti & Munadi, 2014). Namun, hal ini tidak berarti bahwa individu dengan tingkat pendidikan rendah memiliki pengetahuan yang sangat terbatas.

2.2.5. Gender

Gender mengacu pada norma sosial atau perilaku yang dianggap sesuai dengan peran atau posisi tertentu dalam masyarakat (Kiranantika, 2022). Pembagian pekerjaan, posisi, dan kewajiban antar individu sering kali didasarkan pada gender, yang mana norma ini tidak selalu ditentukan oleh karakteristik biologis, tetapi lebih kepada konstruksi sosial yang diterima dalam budaya dan masyarakat tertentu. Gender juga sering dikaitkan dengan orientasi seksual, meskipun ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembentukan peran gender dalam masyarakat (Jasni et al., 2024).

2.3. Hubungan Sensitivitas Etika Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Berdasarkan Pekerjaan, Pendidikan, dan Gender

2.3.1. Pengaruh Pekerjaan Terhadap Sensitivitas Etika Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax evasion)

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi sensitivitas etika terhadap penggelapan pajak. Karakteristik pekerjaan dapat menunjukkan sejauh mana pengambilan keputusan yang dibuat oleh seseorang berhubungan dengan pekerjaannya dan seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul (Risa, 2017). Pekerjaan yang melibatkan pengambilan keputusan besar dan memiliki tanggung jawab sosial sering kali berpengaruh pada pandangan etika individu terhadap kewajiban perpajakan, yaitu UU No. 28 Tahun 2007.

2.3.2. Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Sensitivitas Etika terhadap Penggelapan Pajak

Pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap etika seseorang terhadap penggelapan pajak. Pendidikan membentuk kecakapan intelektual dan emosional yang penting untuk memahami fenomena sosial seperti kewajiban pajak (Ahmadi & Uhibiyati, 2001). Selain itu, kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap fungsi dan tujuan pajak (Harahap, 2004).

2.3.3. Dampak Gender Terhadap Perbedaan Sensitivitas Etika Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Gender juga mempengaruhi persepsi dan sensitivitas etika terhadap penggelapan pajak. Perempuan cenderung lebih etis dalam pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki (Beutell & Brenner, 1984). Hal ini terkait dengan sosialisasi yang membentuk laki-laki untuk lebih kompetitif, sementara perempuan lebih menekankan hubungan sosial (Widodo, 2023). Perbedaan ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap penggelapan pajak.

2.3.4. Keterkaitan Antara Pekerjaan, Pendidikan, dan Gender dalam Membentuk Sensitivitas Etika terhadap Penggelapan Pajak

Tiga faktor ini, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan gender, berperan saling berkaitan dalam membentuk pandangan etis terhadap penggelapan pajak. Individu yang memiliki pekerjaan yang menuntut pengambilan keputusan besar, pendidikan yang tinggi, dan orientasi gender yang cenderung lebih etis (seperti perempuan) dapat memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap penggelapan pajak. Penelitian lebih lanjut dapat melihat bagaimana faktor-faktor ini saling

mempengaruhi dalam konteks etika perpajakan. Dengan demikian, keterkaitan antar variabel - variabel tersebut yang mempengaruhi sensitivitas etika terhadap penggelapan pajak dapat dianalisis lebih lanjut. Setiap variabel memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan etis individu terhadap kewajiban pajak, dan ketiga faktor ini dapat saling berinteraksi dalam membentuk sikap seseorang terhadap penggelapan pajak..

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis dampak penggelapan pajak terhadap ekonomi dan psikologi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekalongan (Leavy, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara penggelapan pajak dengan berbagai faktor ekonomi dan psikologis yang terpengaruh. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan, dengan total sebanyak 18.814 wajib pajak terdaftar. Responden memiliki beragam latar belakang ekonomi dan pekerjaan, sesuai dengan karakteristik populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan dianggap relevan sebagai sumber data (Sugiyono & Lestari, 2021). Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah item untuk menggali informasi terkait penggelapan pajak dan dampaknya terhadap ekonomi serta psikologi wajib pajak (Clark et al., 2008). Untuk memastikan keandalan data, setiap aitem dalam kuesioner diuji reliabilitasnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan frekuensi dan proporsi variabel serta hubungan antara variabel yang diteliti (Chih-Pei & Chang, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden serta analisis yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti mengenai temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini.

4.1. Analisis Deskriptif

4.1.1. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Tabel 1. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	150
Kuesioner yang tidak kembali	(46)
Kuesioner tidak lengkap	(4)
Kuesioner yang bisa diolah	100

Sumber: data kuesioner penelitian (2024)

Dari 150 kuesioner yang disebar, sebanyak 46 kuesioner tidak kembali, sementara 4 kuesioner tidak lengkap. Sehingga, jumlah kuesioner yang dapat diolah untuk analisis adalah 100.

4.1.2. Karakteristik Responden

Table 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Perempuan	48	48.0%
Laki – laki	52	52.0%
Jumlah	100	100%

Sumber: data kuesioner penelitian (2024)

Dari 100 responden, terdapat 48% responden perempuan dan 52% responden laki-laki, menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara keduanya.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SMU	39	39.0%
D III / S 1	61	61.0%
Jumlah	100	100%

Sumber: data kuesioner penelitian (2024)

Sebagian besar responden (61%) memiliki pendidikan D III/S1, sementara 39% lainnya memiliki pendidikan SMU, yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	%
Pegawai Pemerintah	44	44.0%
Swasta	56	56.0%
Jumlah	100	100%

Sumber: data kuesioner penelitian (2024)

Mayoritas responden bekerja di sektor swasta (56%), sementara 44% bekerja sebagai pegawai pemerintah.

4.1.2. Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel *Tax evasion*

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun tarif pajak tidak tinggi.	22%	48%	28%	2%	0%
2	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun sistem pajak sudah adil.	20%	53%	25%	1%	1%
3	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun pajak yang dibayarkan sudah digunakan untuk semestinya dalam pembangunan.	14%	59%	25%	1%	1%
4	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun mayoritas dari pajak yang terkumpul dipakai guna proyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara normal.	13%	53%	31%	2%	1%
5	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun sebagian besar pajak yang dibayarkan memberikan manfaat secara tidak langsung kepada pembayar pajak.	10%	56%	32%	1%	1%
6	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun tidak semua orang melakukannya.	16%	52%	31%	0%	1%
7	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan dari pajak yang terhimpun karena jadi pemasukan bagi politisi yang korupsi, keluarganya, juga temannya.	11%	49%	38%	2%	0%
8	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun saya sanggup untuk membayar pajak.	15%	44%	40%	1%	0%
9	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun pemerintah tidak melakukan diskriminasi atas agama, etnis, pendidikan atau pekerjaan.	25%	43%	30%	1%	1%
10	<i>Tax evasion</i> dianggap etis meskipun termasuk tindak kejahatan.	18%	49%	33%	0%	0%

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
Total		164%	506%	313%	11%	6%

Sumber: data kuesioner penelitian (2024)

Berdasarkan tabel distribusi jawaban pada variabel *Tax evasion*, mayoritas responden menunjukkan ketidaksetujuan terhadap berbagai pernyataan yang menganggap *tax evasion* sebagai tindakan yang etis meskipun dengan alasan tertentu. Sebagai contoh:

1. Pada pernyataan "*Tax evasion* dianggap etis meskipun tarif pajak tidak tinggi," sebanyak 48% responden tidak setuju (TS), dan 22% sangat tidak setuju (STS).
2. Pada pernyataan "*Tax evasion* dianggap etis meskipun sistem pajak sudah adil," 53% responden tidak setuju.
3. Pada pernyataan "*Tax evasion* dianggap etis meskipun pajak yang dibayarkan sudah digunakan untuk semestinya dalam pembangunan," sebanyak 59% responden tidak setuju.
4. Pada pernyataan "*Tax evasion* dianggap etis meskipun sebagian besar dari pajak yang terkumpul dipakai untuk proyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara normal," sebanyak 53% responden tidak setuju.
5. Begitu juga pada pernyataan "*Tax evasion* dianggap etis meskipun sebagian besar pajak yang dibayarkan memberikan manfaat secara tidak langsung kepada pembayar pajak," dengan 56% responden tidak setuju.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menyetujui anggapan bahwa penghindaran pajak (*tax evasion*) bisa dianggap etis dalam berbagai situasi yang disebutkan dalam pernyataan tersebut.

4.2. Analisis Deskripsi Kuantitatif

4.2.1. Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrumen

No	r hitung	r table	Keterangan
1	0.516	0.197	Valid
2	0.644	0.197	Valid
3	0.588	0.197	Valid
4	0.508	0.197	Valid
5	0.527	0.197	Valid
6	0.632	0.197	Valid
7	0.259	0.197	Valid
8	0.628	0.197	Valid
9	0.747	0.197	Valid
10	0.402	0.197	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji validitas instrumen, dengan semua item memiliki nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* (0.197), yang berarti semua item dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Rangkuman Uji Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	Cronbach Alpha	Syarat	Kesimpulan
1	Sensitivitas Etika Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax evasion</i>)	0.724	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel 7 menyajikan hasil uji reliabilitas instrumen, di mana variabel *Sensitivitas Etika Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak (Tax evasion)* memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.724, yang lebih besar dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen ini reliabel.

4.2.3. Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Tax evasion</i>
	N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	38.1100
	Std. Deviation	4.02993
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.094
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.009
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.261

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel 8 menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk variabel *Tax evasion*. Dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.261, yang lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

4.2.4. Uji t

4.2.4.1. *Sensitivitas Etika Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak Berdasarkan Pekerjaan*

Tabel 9. *Tax evasion* Berdasarkan Pekerjaan

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
<i>Tax evasion</i>	Equal variances assumed	-.261	98	.795
	Equal variances not assumed	-.265	87.855	.791

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Atas dasar tabel bisa dipahami skor signifikasi perbedaan sensitivitas etika wajib pajak atas penggelapan pajak berdasarkan pekerjaan senilai 0.791. Karena nilai signifikasinya >0.05 ($0.791 > 0.05$) bisa diambil simpulan tak ada diferensiasi sensitivitas etika berdasarkan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa H1 ditolak.

4.2.4.2. *Sensitivitas Etika Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak Berdasarkan Pendidikan***Tabel 10.** *Tax evasion* Berdasarkan Pendidikan

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
<i>Tax evasion</i>	Equal variances assumed	2.325	98	.022
	Equal variances not assumed	2.018	49.110	.049

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Atas dasar tabel bisa dipahami skor signifikansi perbedaan sensitivitas etika wajib pajak atas penggelapan pajak berdasarkan pendidikan sebesar 0.049. karena nilai signifikasinya lebih kecil 0.05 ($0.049 < 0.05$) bisa diambil simpulan ada diferensiasi sensitivitas etika berdasarkan pendidikan. Hal ini berarti bahwa H2 diterima.

4.2.4.3. *Sensitivitas Etika Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender***Tabel 10.** *Tax evasion* Berdasarkan Gender

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
<i>Tax evasion</i>	Equal variances assumed	-.191	98	.849
	Equal variances not assumed	-.201	93.961	.841

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Atas dasar tabel bisa dipahami skor signifikansi perbedaan sensitivitas etika wajib pajak atas penggelapan pajak berdasarkan gender senilai 0.841. Karena nilai signifikasinya > 0.05 ($0.841 > 0.05$) bisa diambil simpulan tak ada diferensiasi sensitivitas etika berdasarkan gender. Hal ini berarti bahwa H3 ditolak.

4.3. *Pembahasan Hasil Temuan*

Dari 150 kuesioner yang disebarkan, hanya 100 kuesioner yang dapat diolah, setelah 46 tidak kembali dan 4 tidak lengkap, yang berarti sekitar 67% berhasil dikembalikan. Karakteristik responden menunjukkan distribusi yang seimbang antara laki-laki (52%) dan perempuan (48%), dengan mayoritas responden (61%) memiliki pendidikan D III/S1. Sebagian besar responden bekerja di sektor swasta (56%), sedangkan 44% bekerja di sektor pemerintah. Hasil analisis menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan anggapan bahwa *tax evasion* dapat dianggap etis dalam kondisi tertentu, dengan 48% responden tidak setuju jika tarif pajak rendah menjadi alasan, dan 22% sangat tidak setuju. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam instrumen penelitian valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0.197). Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha 0.724, yang menandakan bahwa instrumen penelitian konsisten dan reliabel. Sementara itu, uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.261, yang lebih besar dari 0.05, mengindikasikan bahwa data distribusinya normal dan memenuhi asumsi untuk analisis statistik lebih lanjut (Ghozali, 2006).

4.3.1. *Pengaruh Pendidikan terhadap Sensitivitas Etika*

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0.049 untuk perbedaan sensitivitas etika berdasarkan pendidikan, yang lebih kecil dari 0.05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan dalam sensitivitas etika berdasarkan tingkat pendidikan. Sebuah penelitian mendukung temuan ini dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kesadaran

dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Andiani, 2022). Hal ini juga sejalan dengan penelitian kedua yang menyatakan bahwa individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih etis dan memahami pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara (Siwy, 2015).

4.3.2. Pengaruh Pekerjaan terhadap Sensitivitas Etika

Untuk perbedaan sensitivitas etika berdasarkan pekerjaan, hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0.791, yang lebih besar dari 0.05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam sensitivitas etika berdasarkan pekerjaan. Penelitian semisal juga menemukan hal serupa, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan terkait sensitivitas etika antara individu yang bekerja di sektor swasta dan pemerintah (Dewi & Sumadi, 2020). Hal ini bisa disebabkan oleh kesamaan dalam pemahaman etika yang diterima oleh masyarakat secara umum, meskipun sektor pekerjaan berbeda (Pradesa, 2018).

4.3.3. Pengaruh Gender terhadap Sensitivitas Etika

Hasil uji t untuk perbedaan sensitivitas etika berdasarkan gender menunjukkan nilai signifikansi 0.841, yang lebih besar dari 0.05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam sensitivitas etika berdasarkan gender. Hal ini konsisten dengan salah satu penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga menemukan bahwa gender tidak memengaruhi secara signifikan persepsi terhadap etika (Dharma et al., 2016). Meskipun penelitian lain mungkin menunjukkan perbedaan persepsi etika antara pria dan wanita, dalam konteks ini, namun hasil menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita cenderung memiliki pandangan yang serupa terkait penghindaran pajak (Yuliana & Cahyonowati, 2012).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, mayoritas responden tidak menganggap penghindaran pajak (*tax evasion*) sebagai tindakan yang etis, meskipun dalam berbagai kondisi yang diajukan. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa sensitivitas etika masyarakat terhadap *tax evasion* cukup tinggi, terutama terkait dengan aspek keadilan dalam pajak. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada pandangan responden terhadap *tax evasion*, meskipun tidak ditemukan perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kewajiban perpajakan dan dampak negatif dari *tax evasion*. Pendidikan yang lebih baik terkait pengelolaan pajak dan keadilan sistem perpajakan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sikap masyarakat terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2001). *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Andiani, Y. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60674>
- Asri Harahap, A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.

- Aulia, K. P. (2023). *Pengaruh Religiusitas, Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. FEB UIN JAKARTA. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82363>
- Baiti, A. A., & Munadi, S. (2014). Pengaruh pengalaman praktik, prestasi belajar dasar kejuruan dan dukungan orang tua terhadap kesiapan kerja siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 4(2), 164–180. <https://doi.org/10.21831/jpv.v4i2.2543> Abstract
- Bertens, K. (2004). *Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8*.
- Beutell, N. J., & Brenner, O. (1984). Birth Order, Sex and Geographical Region as Influence on WARM Scores: Are Difference. *Paper Present at Annual Convention of Academy of Management. Boston*.
- Chih-Pei, H. U., & Chang, Y.-Y. (2017). *John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. <https://doi.org/10.1453/jsas.v4i2.1313>
- Clark, V. L. P., Creswell, J. W., Green, D. O., & Shope, R. J. (2008). *Mixing quantitative and qualitative approaches: An introduction to emergent mixed methods research*.
- Dewi, N. P. S. U., & Sumadi, N. K. (2020). Pengaruh budaya etis organisasi dan integritas terhadap kualitas audit dengan sensitivitas etika auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 63–94. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.974>
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). *Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak*. Riau University.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, A. (2017). *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7ezmq>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Jasni, M. A., Jaafar, W. M. W., & Zainalaludin, Z. (2024). Pembangunan Identiti Seksual dan Gender Serta Teori Pembangunan Gender. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 9(1), e002682–e002682. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i1.2682>
- Keraf, S., & Imam, R. H. (1998). *Etika bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48–55. <https://ijsed.ap3si.org/index.php/journal/article/view/77>
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Publications.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Mentari, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JURNAL FAIRNESS*, 14(2), 107–142. <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i2.36673>
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159.
- Parwati, N. N., Suryawan, I. P. P., & Apsari, R. A. (2023). *Belajar dan pembelajaran*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Pradesa, H. A. (2018). Peran Komitmen Afektif Dalam Memperkuat Dampak Dari Dimensi Iklim Kerja Etis Terhadap Perasaan Berkewajiban Pegawai. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 16–29. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i2.21>

- Puspitaningrum, R. R. (2018). *Pengaruh gender, level pendidikan, tingkat pendapatan, dan keragaman etnis terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Penerapan theory of planned behavior)*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11606>
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771–3792. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.318>
- Risa, N. (2017). Sensitivitas Etis Mahasiswa Atas Penggelapan Pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 178–195. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i2.938>
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Sipuan, S., Sirajuddin, S., Zulkarnain, Z., & Suradi, A. (2023). Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Profesi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1), 373–384. <https://doi.org/10.37905/aksara.9.1.373-384.2023>
- Siwy, A. F. A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado)*. Politeknik Negeri Manado. <http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/292>
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alvabeta.
- Sumaryono, E. (1995). *Hermeneutik: Sebuah metode filsafat*. Penerbit Kanisius.
- Syafrianto. (2014). *Kumpulan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Tahun 2013*. <http://syafrianto.blogspot.co.id>
- Widodo, C. A. H. (2023). Pengaruh gender dan religiusitas terhadap etika penggelapan pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2845–2850. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2652>
- Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.02.18>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran theory of planned behavior dan nilai kearifan lokal terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebuah kajian eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Yuliana, Y., & Cahyonowati, N. (2012). *Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi Dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di Semarang)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. <https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/4900>